

Peran Ulama dalam Pembaharuan Kurikulum Pendidikan di Aceh: Studi Pada Organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)

¹Amarullah, ²Khairul Fahmi

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hilal Sigli

Email: ¹amarullahyacobpidie@gmail.com ²khairulfahmi815@gmail.com

Abstract

This article discusses the role of the Association of Ulama of All Aceh (PUSA), particularly in relation to the reform of the Islamic education curriculum in Aceh. Islamic education in this “Veranda of Mecca” has continued to undergo changes, both positive developments and setbacks, from the era of the sultanate to the period of revival following Indonesia’s independence. The author argues that the PUSA organization plays a crucial role in the reform of the Islamic education curriculum in Aceh. The author used the library research method to obtain data regarding the role of the PUSA organization. The results of the study indicate that the Aceh Ulama Association (PUSA) successfully integrated subjects, modernized the education system in Aceh, and established regulations for teachers, students, and prospective new students. This was done as a form of commitment to improve the quality of Islamic education in Aceh, while simultaneously enhancing the quality of learning, discipline, teaching effectiveness, and the development of human resources oriented toward societal progress.

Keywords: Ulama, Aceh Islamic Education Curriculum, PUSA.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Aceh pada awalnya didominasi oleh *dayah*, dimana *dayah* menjadi sentral pendidikan tradisional Islam bagi masyarakat. Ada beberapa *dayah* terkenal di Aceh seperti *Zawiyah Tanoh Abee*, *Zawiyah Cot Kala*, *Zawiyah Cut Tiro*, *Zawiyah Mesjid Raya* dan lainnya. Para ulama *dayah* sangat mendominasi gerakan intelektual Islam, mereka menulis dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Pada momentum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional ke-12 yang diselenggarakan di Aceh tahun 1981, panitia acara pernah menerbitkan sebuah buku tentang Aceh berjudul *Dari Sini Ia Bersemi*,

pada buku tersebut terdapat satu bab menarik yang ditulis oleh Ali Hasjmy dengan topik nafas Islam dalam kesusteraan Aceh.¹

Ali Hasjmy menyebutkan bahwa diantara karya para ulama yang ditulis yaitu Hamzah Fansuri menulis kitab: *Asrarul Arifin Fi Ilmis Suluk Wa Tauhid* (ilmu filsafat), *Asyrabul Asyiqin wa Zinatul Muwahhidin* (ilmu filsafat ketuhanan). Syekh Syamsuddin As-Sumatrani menulis *Kitabul Martabah* (ilmu filsafat), *Syarah Ruba'i Hamzah Fanshuri* (syarah sastra Hamzah Fansuri). Nurrudin Ar-Raniry menulis *Ash Sirathal Mustaqim* (ilmu hukum Islam), *At-Tibyan Fi Ma'rifatil Adyan* (ilmu tauhid). Abdurrauf As Singkil menulis *Turjumanul Mustafid* (ilmu tafsir), *Bayan Tajalli* (ilmu filsafat). Syaikh Abbas Kuta Karang menulis *Kitaburahmah* (ilmu kedokteran).²

Karya-karya para ulama yang ditulis oleh Ali Hasjmy di atas tentunya baru sebagian, dia hanya menuliskan sebagian nama ulama yang masyhur. Sekarang ini juga banyak manuskrip-manuskrip karya ulama ditemukan oleh kolektor manuskrip, hal ini dapat menambah informasi mengenai karya ulama. Penemuan-penemuan baru tersebut semakin memberikan fakta sejarah bahwa dayah dan jaringan intelektual Islam di Aceh pernah berada pada titik kemajuan. Akan tetapi, *dayah* sebagai penopang pendidikan Islam di Aceh mengalami kemunduran setelah kehadiran penjajah, dimana mereka melakukan upaya-upaya yang kemudian merugikan pendidikan Muslim di Aceh. Hasbi menyebutkan bahwa keberadaan lembaga pendidikan Islam di bawah kekuasaan penjajah dikontrol sangat ketat, mereka bahkan melarang mengajarkan beberapa mata pelajaran berhubungan dengan politik dan segala ilmu yang dianggap dapat memajukan umat. Setelah mengalami pembatasan oleh kolonial, cakupan pendidikan Dayah menjadi sangat sempit, hanya mengajarkan ilmu-ilmu murni saja seperti tauhid, tasawuf dan fiqh.³

Di sisi lain, Belanda memainkan politik dalam dunia pendidikan, mereka membangun lembaga-lembaga pendidikan bercorak Eropa di Aceh seperti *Volkschool* (sekolah desa), *Vervolgschool* (lanjutan sekolah desa), *Hollandsche Inlandsche School* (HIS) dan *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO). Hal ini bisa dilihat dalam tulisan Nazaruddin Sjamsuddin, dimana dia mengatakan bahwa perbandingan pendidikan tradisional dengan pendidikan kolonial

¹ Azyumardi Azra dan Idris Thaha, *Menggapai solidaritas: tensi antara demokrasi, fundamentalisme, dan humanisme*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 227, <https://search.worldcat.org/title/53308171>.

² Ali Hasjmy, *Dari Sini Ia Bersemi* (Banda Aceh: Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1981), 272.

³ M. Hasbi Amiruddin, *Aceh Dan Serambi Makkah*, Edisi revisi, cetakan II (Banda Aceh: PeNA, 2008), 30.

memiliki perbedaan yang signifikan, ciri utama pendidikan Eropa sangatlah jelas yaitu bersifat terbatas dan diskriminatif.⁴

Selain itu, Nazaruddin Sjamsuddin juga menyebutkan bahwa Awal didirikan lembaga pendidikan kolonial memang dikhususkan kepada anak-anak Belanda. Kemudian sekolah kolonial baru dibuka untuk anak pejabat elit di Aceh. Sementara itu, bagi masyarakat biasa masih tidak diperbolehkan sekolah di lembaga pendidikan kolonial sehingga anak masyarakat biasa hanya mendapatkan pendidikan tradisional di dayah atau di meunasah. Setelah beberapa tahun kemudian sekolah kolonial baru dibuka untuk masyarakat umum, itupun sangat dibatasi dan sangat deskriminatif.

Hadirnya sistem pendidikan kolonial Belanda memberikan dampak signifikan terhadap dayah di Aceh. Seturut itu, sistem pendidikan kolonial mencoba membatasi dayah melalui kebijakan-kebijaka yang berlandaskan ketakutan. Hal ini dilakukan oleh penjajah karena mereka memahami bahwa jika keberadaan dayah sebagai lembaga pendidikan di Aceh terus dibiarkan, maka akan menjadi ancaman serius bagi pihak mereka. Hal ini dikarenakan dayah memiliki dwi fungsi yaitu sebagai lembaga pusat pendidikan sekaligus menjadi tempat sentral pergerakan melawan penjajah. Ali Hasjmy menyebutkan bahwa pada saat Belanda menjajah Aceh, banyak dayah-dayah di Aceh bertambah fungsinya, tidak hanya sebagai tempat belajar namun juga menjadi markas militer, pimpinan dayah akan menginstruksikan dan melatih santri menjadi militer. Salah satu contohnya yaitu dayahTeungku Syik Pante Geulima, Meureudu. Hal sama juga terjadi pada dayah-dayah lainnya di Aceh.⁵

Melihat kondisi Aceh yang mengalami ketertinggalan, ulama dan umara menggagas lahirnya sebuah organisasi Islam. Hal ini semakin dipercepat setelah adanya kiriman surat dari Syaikh Hamid (Ayah Hamid Samalanga) yang pada saat itu berada Mekkah, Beliau menulis surat berbahasa Arab di sela-sela koran harian terbitan Mekkah, berikutnya dikirimkan kepada ulama di Aceh, tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran tentang situasi di dunia Islam.⁶

Ulama Aceh merespon surat tersebut dan mendiskusikan dengan tokoh Aceh tentang langkah-langkah yang akan ditempuh untuk membentuk wadah organisasi Islam. Pengambil

⁴ Nazaruddin Sjamsuddin, *Revolusi di serambi Mekah: perjuangan kemerdekaan dan pertarungan politik di Aceh, 1945-1949*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1999), 27.

⁵ A. Hasjmy, *Ulama Aceh: Mujahid, Pejuang Kemerdekaan, Dan Pembangun Tamadun Bangsa*, Cet. 1 (Jakarta: Diterbitkan oleh PT. Bulan Bintang untuk Perpustakaan dan Museum Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, 1997), 19.

⁶ M. Hasbi Amiruddin, *The Response of the Ulama Dayah to the Modernization of Islamic Law in Aceh*, Cet. 1, Siri Aceh Meukuta Alam (Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005), 75.

inisiatifnya yaitu Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap dan Teungku Muhammad Dawud Beureueh dengan mendapat restu serta perlindungan dari Teuku Chik Muhammad Johan Alamsyah, Uleebalang Peusangan.⁷ Tanggal 12 Rabiul Awal 1358 H / 5 Mei 1939 M menjadi penentuan titik awal menata ulang Aceh. Ulama dan umara mengagendakan musyawarah dalam momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad, kegiatan ini diselenggarakan di kompleks pendidikan Al-Muslim, Bireun. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka disepakati pembentukan secara resmi sebuah organisasi Islam yang diberi nama Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau disingkat dengan PUSA.

Semenjak didirikan, organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) terus memberikan perbaikan pendidikan ummat, pembaharuan kurikulum membawa dampak baik bagi kemajuan Aceh. Organisasi ini semakin banyak dikenal oleh masyarakat luas sehingga berada pada puncak kejayaannya. Lebih Sepuluh tahun (1939-1953) organisasi ini mengayomi Aceh, telah banyak perobahan sikap, pemikiran dan cara berfikir orang Aceh dari taklid tidak tahu asal usul kepada kemahiran dan kepandaian yang punya rujukan.⁸

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada kajian mengenai peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dalam pembaharuan kurikulum pendidikan di Aceh yang belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Selama ini, kajian tentang PUSA lebih banyak difokuskan pada aspek perjuangan politik, gerakan sosial keagamaan, dan peran ulama dalam mempertahankan identitas Islam di Aceh, sedangkan penelitian yang menelaah kontribusi PUSA terhadap reformasi kurikulum dan modernisasi sistem pendidikan Islam masih relatif terbatas. Penelitian ini menempatkan ulama tidak hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai aktor pembaharuan pendidikan yang berperan dalam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, menyusun regulasi pendidikan, serta membangun sistem pembelajaran yang lebih modern dan terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian sejarah pendidikan Islam, khususnya terkait peran organisasi ulama dalam transformasi kurikulum pendidikan di Aceh.

Artikel ini akan membahas terkait peran ulama dalam pembaharuan kurikulum di Aceh. Lebih detailnya berfokus pada peran organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dalam

⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Andil PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) Untuk Bangsa Dan Negara*, Cetakan kedua (Banda Aceh: PeNA, 2021), 41.

⁸ Nur'aini, *Peran Ulama Dalam Politik Aceh Kontemporer* (Darussalam, Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Ar-Raniry, 2013), 104.

pembaharuan kurikulum pendidikan Islam di Aceh. Adapun penulis berpendapat bahwa organisasi PUSA memiliki peran penting dalam merekonstruksi ulang sistem kurikulum pendidikan Islam di Aceh pasca penjajahan kolonial Belanda. Seturut itu, tulisan ini ingin memberikan pemahaman ulang atau merawat kembali ingat kolektif bahwa pernah ada organisasi ulama di Aceh yang memiliki peran penting dalam pembaharuan kurikulum dalam sistem pendidikan Islam di Aceh.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Rahmadi menyebutkan bahwa jenis penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti dokumen, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.⁹ Seturut itu, Winarno mengatakan bahwa Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual teoritis. Secara sederhana jenis penelitian ini berusaha menghimpun data penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan teks sebagai objek utama analisisnya.¹⁰

Oleh karena itu, jenis penelitian kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dalam melakukan pembaharuan kurikulum pendidikan Islam di Aceh pada tahun 1939–1953. Penelitian dilakukan secara mendalam sehingga menghasilkan kesimpulan yang signifikan dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini dibatasi pada rentang waktu 1939–1953 karena periode tersebut merupakan fase berkembangnya gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang dipelopori oleh PUSA di Aceh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sejarah untuk menganalisis proses pembaharuan kurikulum pendidikan Islam yang dilakukan oleh PUSA. Adapun sumber kepustakaan primer yang digunakan meliputi arsip, dokumen organisasi PUSA, catatan sejarah, serta karya-karya tokoh yang berkaitan langsung dengan aktivitas pembaharuan pendidikan pada masa tersebut. Sementara itu, sumber kepustakaan sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai hasil penelitian terdahulu

⁹ John W Creswell dan J. David Creswell author, *Research Desing: Quantitative, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sexta edición, Research Methods (Thousand Oaks, California: SAGE Publications Ltd., 2023), 234, https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf.

¹⁰ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, Ed. 2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 63.

yang relevan dengan pembaharuan pendidikan Islam, sejarah pendidikan Aceh, dan peran ulama dalam sistem pendidikan Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Islam di Aceh

Pendidikan Islam dalam konteks Aceh sangatlah menarik, hal ini dikarenakan Aceh sebagai salah satu daerah yang dikenal dengan syariat Islam, kehidupan masyarakat Aceh dalam berbagai lini tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keislaman, termasuk bidang pendidikan. Dayah atau pondok pesantren merupakan pusat lembaga pendidikan Islam yang populer di Aceh pada masanya. Hadirnya lembaga pendidikan Islam seperti Dayah menjadi tolak ukur bahwa Islam dan umatnya telah memainkan peran dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut menjadi alasan pentingnya mengetahui sejarah pendidikan Islam di Aceh secara keseluruhan.

Sejarah pendidikan Islam di Aceh dapat dibagi menjadi beberapa periode yaitu masa kerajaan, masa kolonial dan masa munculnya kesadaran kembali kebangkitan Islam di Aceh setelah terjadinya kolonialisme. Setiap periode memiliki ciri dan kondisi berbeda-beda.

Periode kerajaan menjadi titik awal dari sejarah pendidikan Islam di Aceh, ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang memberikan pengaruh besar terhadap proses perkembangan pendidikan Islam. Secara politis hadirnya kerajaan Islam mempermudah terjadinya penyebaran Islam. Ketika kekuasaan politik Islam semakin kokoh maka pendidikan semakin memperoleh perhatian, karena kekuatan politik digabungkan dengan semangat para pengajar agama saat itu. Ditinjau dari segi wilayah Aceh hari ini, kerajaan-kerajaan Islam tersebar di beberapa wilayah, ada diantara nama-nama kerajaan Islam yang masyhur karena namanya terdapat dalam catatan para pengembara asing, serta sering disebut-sebut dalam buku bacaan. Namun ada juga kerajaan-kerajaan Islam yang jarang disebutkan. Diantara kerajaan Islam yang pernah wujud di Aceh yaitu Kerajaan Samudera Pasai, Lamuri, Bihari, Perlak, Pedir, Aceh Darussalam, Tamiang, Linge, Susoh, Daya dan beberapa kerajaan kecil lainnya.

Pada masa kerajaan banyak lembaga pendidikan Islam yang ada di Aceh, keberedaannya sangat memberikan dampak terhadap pembinaan masyarakat. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Aceh yaitu *Meunasah*¹¹, *Masjid*¹², *Rangkang*¹³, dan *Dayah*.¹⁴

¹¹ Basri Ibrahim, "PENDIDIKAN ISLAM DI ACEH (1966-1998) DENGAN MENGANALISIS ASPEK PERUBAHAN (TRANSFORMASI)," *ANALYTICA ISLAMICA* 21, no. 2 (2019): 138–48.

Adapun keberadaan keempat lembaga pendidikan Islam di Aceh tersebut telah memberikan andil dalam mengisi kemajuan pendidikan. Seturut itu, lembaga-lembaga ini telah melahirkan ulama, pemimpin, pendidik dan pendakwah. Adapun periode kolonial Belanda antara tahun 1873-1910 ditandai dengan mundurnya Pendidikan Islam di Aceh dikarenakan Belanda berhasil memenangkan perang. Kolonial Belanda sebagai pihak yang menang dan Aceh sebagai pihak kalah perang mempunyai sikap dan tindakan yang berbeda dalam mempertahankan eksistensinya masing-masing. Sebagai pemenang, Belanda melakukan kebijakan politik yang menguntungkan pihaknya, ada perjanjian bernama *Korte Verklaring* (perjanjian pendek), ada tiga poinisi perjanjian tersebut yaitu pertama, setia kepada Ratu Belanda. Kedua, menjadikan musuh Belanda sebagaimana musuhnya atau sebaliknya. Ketiga, menjalankan segala perintah Ratu Belanda atau perwakilannya.¹⁵

Teuku Ibrahim Alfian dalam karyanya berjudul *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah* juga menulis tentang perjanjian kaum elit Aceh dengan pemerintah Belanda. Alfian menyebutkan bahwa antara tahun 1874-1876 tercatat ada 31 Uleebalang yang menandatangani perjanjian pendek, sementara itu pada tahun 1900 tercatat ada 82 dari 100 Uleebalang yang tunduk dan mengakui kedaulatan Belanda.¹⁶ Berdasarkan informasi dari Alfian, dapat dikatakan bahwa awal abad 20 hampir seluruh pemimpin wilayah Aceh takluk kepada pemerintah Belanda. Secara *de jure* pemimpin Aceh sudah takluk, namun perjuangan secara fisik terus dilakukan oleh sebagian pejuang, meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan kolonial.

Selama berlangsungnya penjajahan kolonial di Aceh, pendidikan Islam menjadi kacau dan tidak stabil. Belanda melakukan upaya-upaya menghambat masyarakat memperoleh pendidikan dari lembaga tradisional, terutama dayah. Dalam pemahaman Belanda, dayah dihuni oleh orang yang fanatik agama, mereka akan melakukan apa saja demi tegaknya Islam. Banyak Teungku dayah menjadi pemimpin perang, begitupun para santri menjadi pasukan yang berada di garda terdepan melakukan *jihad fi sabilillah*. Memberikan kebebasan bagi masyarakat Aceh memperoleh pendidikan dayah maka nantinya akan membawa malapetaka bagi Belanda dalam menguasai Aceh. Hasbi Amiruddin dalam bukunya *Aceh dan Serambi Makkah* menyebutkan

¹² Sudirman, *Mesjid-Mesjid Bersejarah Di Aceh* (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), 5.

¹³ C. Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), 31.

¹⁴ Hasjmy, *Dari Sini Ia Bersemi*, 269.

¹⁵ Hasbullah, *Uleebalang, Dari Kesultanan Hingga Revolusi Sosial, 1514-1946*, ed. oleh Rusdi Sufi (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2015), 16.

¹⁶ Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 94.

bahwa Belanda mengontrol lembaga pendidikan di Aceh, mereka melarang mengajarkan beberapa mata pelajaran yang berhubungan dengan politik karena dianggap dapat memajukan ummat Islam.¹⁷

Seturut itu, setelah masa kolonial Belanda selesai, Pendidikan Islam di Aceh memasuki periode Kesadaran untuk membangkitkan kembali pendidikan di Aceh. Adapun bangkitnya pendidikan Islam di Aceh dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Islam modern yang ada di wilayah timur tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Turki dan sebagainya. Kehadiran gerakan-gerakan moderen di dunia Islam juga memberi inspirasi bagi bangkitnya organisasi dan pergerakan Islam moderen di Nusantara. Didin Saefuddin Buchori dalam bukunya berjudul Sejarah Politik Islam menyebutkan bahwa awal abad ke 20 banyak terbentuk organisasi-organisasi Islam moderat di Nusantara, di antaranya seperti Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Al-Washliyah dan Jami'at Khair. Kehadiran organisasi yang sudah disebutkan oleh Didin mempunyai latar belakang dan motif berbeda-beda, namun semuanya memiliki misi yang sama yaitu ingin mewujudkan kemajuan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Kemajuan di bidang politik, ekonomi, kesehatan, agama dan juga pendidikan.¹⁸

Ada banyak tokoh-tokoh di Aceh bergabung dalam organisasi Islam yang skala Nasional. Misalnya tokoh Aceh yang bergabung dalam organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Teungku Muhammad Hasan Krueng Kalee, Teungku Muhammad Waly Al-Khalidi. Organisasi Muhammadiyah muncul tokoh ternama seperti Teuku Muhammad Hasan Gelumpang Payong, Hasbi Ash- Shiddieqy. Pada organisasi Nadhaltul Ulama diantara tokohnya yaitu Teungku Ibrahim, Tuwanku Djohan Ali, M Daud Hasan dan lainnya. Organisasi yang sudah disebut di atas sedikit dari banyaknya organisasi Islam yang memiliki cabang di Aceh, setiap organisasi memiliki andil besar dalam melakukan perubahan bidang pendidikan kala itu. Misi organisasi dapat terwujud dalam tempo yang tidak begitu lama, hal ini dikarenakan banyak tokoh-tokoh Aceh yang berpengaruh terlibat di dalamnya.

2. Sejarah Munculnya PUSA

Pada tanggal 12 Rabiul Awal 1358 H/5 Mei 1939 M, tepatnya pada momentum memperingati lahirnya Nabi Muhammad (Maulid), digelar pertemuan lintas tokoh Aceh di

¹⁷ Amiruddin, *Aceh Dan Serambi Makkah*, 30.

¹⁸ Didin Saefuddin, *Sejarah Politik Islam*, Cetakan pertama (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2009).

komplek pendidikan Al-Muslim milik Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap. Pada pertemuan tersebut pertama sekali muncul penamaan secara resmi organisasi lokal dikenal moderat yang diberi nama Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau disingkat dengan PUSA. Ini menjadi titik awal sejarah berdirinya organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

Kehadiran PUSA menjadi motor penggerak perubahan di Aceh, organisasi ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru wilayah Aceh. PUSA tidak saja cepat dan gencar mengadakan modernisasi dalam pendidikan keagamaan tetapi juga merumuskan kembali ideologi Aceh. Taufik Abdullah menyebutkan bahwa pada saat tokoh-tokoh PUSA berpidato, isi pembahasan yang disampaikan yaitu tentang meraih kembali kesadaran dan prinsip hidup masyarakat Aceh yang sesungguhnya. Citra Aceh sebagai Serambi Mekkah dihidupkan kembali melalui pergerakan tokoh-tokoh pembaharuan PUSA.¹⁹

Seturut itu, Hasanuddin Yusuf Adan menyebutkan bahwa pada masa itu masyarakat seluruh Aceh menyatu dengan PUSA dan mendukung penuh usaha dakwah yang dilakukan PUSA. Ada beberapa kelebihan membuat organisasi ini diminati oleh masyarakat dan cepat berkembang diantaranya sumber dayanya orang yang berkualitas, berani dan tanggap dengan perkembangan zaman yang ada, mengedepankan kepentingan ummat, bergerak berdasarkan nilai-nilai islam seperti jujur, ikhlas, sopan dan mandiri.²⁰

Ada faktor-faktor lain yang sangat menentukan PUSA mendapatkan dukungan dari masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh masa itu. Pertama, organisasi PUSA tidak menempatkan diri sebagai organisasi yang eksklusif, tokoh yang bergabung di dalamnya sangat memahami prinsip humanis. Sebagai contoh, ada sebuah kisah yang ditulis Tempo mengenai kehidupan Daud Beureueh. Hampir setiap akhir pekan Daud Beureueh mengajak cucunya berjalan menyusuri pantai di Banda Aceh, berdua mereka menghampiri nelayan dan membeli ikan segar, kemudian Daud Beureueh mengajak nelayan tersebut membakar ikan di dapur rumahnya dan menyantapnya bersama-sama dengan keluarga dan kerabat nelayan.²¹

Kedua, memiliki musuh yang sama yaitu penjajah. Masyarakat Aceh selama penjajahan hidup dalam kesengsaraan, kegiatan-kegiatan dibatasi, masyarakat sering dicurigai, adu domba ekonomi dan pendidikan tidak stabil. Hal ini membuat masyarakat menaruh kebencian kepada

¹⁹ Taufik Abdullah, *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1987), 175.

²⁰ Adan, *Andil PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) Untuk Bangsa Dan Negara*, 41.

²¹ Nugroho Dewanto, *Daud Beureueh: pejuang kemerdekaan yang berontak* (Jakarta, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) ; Majalah Tempo, 2011), 41.

penjajah, sementara itu PUSA hadir sebagai kedaraan perlawanan terhadap penjajah. Dan Ketiga, Ketiga, tokoh-tokoh PUSA dinilai mempunyai komitmen membangun Aceh ditengah krisis akibat kebijakan penjajah, terutama kebijakan di bidang pendidikan. PUSA mempunyai andil besar dalam menata kembali pendidikan, banyak lembaga pendidikan Islam yang dibangun misalnya di Gampong Usi Kecamatan Mutiara Timur, Garot, Blang Paseh, Bireun, termasuk memperkuat keberadaan lembaga pendidikan Al-Muslim di Matang Geulumpang Dua yang didirikan oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap.²²

Tidak heran berdirinya organisasi ini berhasil membawa dampak besar terhadap Aceh. Banyak masyarakat yang ingin mendukung dan menjadi anggota PUSA, bahkan hampir di setiap kampung terdapat kader PUSA, dukungan ini memperkuat keberadaan organisasi ini dalam menjalankan program dan berkontribusi untuk membangun Aceh. Dukungan kepada PUSA semakin besar setelah berhasil melaksanakan kongres pertama di Kuta Asan Kabupaten Pidie, kongres ini berlangsung 4 hari yaitu mulai tanggal 20-24 April 1940. Ada banyak tokoh di luar Aceh yang diundang dalam kongres tersebut, termasuk diantaranya Mahmud Yunus dari Sumatera Barat.

Mahmud Yunus mengakui bahwa dirinya menghadiri kongres pertama PUSA, hal ini dapat diketahui dari bukunya yang berjudul Sejarah Pendidikan di Indonesia. Mahmud Yunus menyebutkan bahwa dalam kongres itu ditetapkan rencana pengajaran madrasah untuk seluruh daerah Aceh. Mahmud Yunus hadir pada kongres tersebut dengan maksud supaya tercipta persatuan rencana pengajaran madrasah-madrasah seluruh Sumatera khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain itu pada kongres pertama ini juga dibentuk pemuda PUSA, Majelis Tanfiziyah Syariah, Muslimah PUSA, membuat peraturan-peraturan PUSA, pengurus besar menetapkan ide-ide di seluruh cabang, serta membentuk bidang publikasi dan majalah. Bidang penyiaran dan penerbitan PUSA bekerja keras dan berhasil menerbitkan majalah yang berjudul *Penyoeloe* di bawah pimpinan Teungku Ismail Yakob, majalah ini terbit di Bireun dan dicetak di Medan. Kongres pertama ini tersiar luas dengan adanya majalah dan sangat menentukan kemajuan PUSA, dampak dari itu semua nama organisasi ini semakin dikenal oleh masyarakat lokal, Nasional, bahkan dunia internasional.²³

²² *Dedikasi Sang Petarung Tgk. Muhammad Daud Beureueh* (Pustaka Indis, 2018).

²³ Rudi Sufi, *Gerakan Nasional di Aceh 1900-1942* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, t.t.), 86.

Secara tidak langsung keberhasilan menyelenggarakan kongres pertama menjadi penilaian bahwa PUSA memiliki kekuatan. Setelah kongres pembangunan Aceh juga semakin gencar dilakukan, terutama dalam bidang pendidikan dan perbaikan ekonomi masyarakat. Kekuatan ini juga digunakan sebagai alat propaganda terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Pengurus PUSA juga mengambil momentum ini untuk membuat kerjasama dengan Jepang. Pada tanggal 21 Februari 1942 malam Minggu beberapa tokoh PUSA diutus ke Pulau Pinang membahas kerjasama tersebut, rombongan ini dipimpin oleh Teungku Abdul Hamid, mereka diterima dengan baik oleh petinggi Jepang di Pulau Pinang.

Namun ada hal menarik yang ditulis M. Junus Jamil dalam karyanya berjudul *Riwayat Barisan "F"* (Fujiwara Kikan) di Aceh, disebutkan bahwa jauh sebelum diadakan hubungan dengan Jepang, sudah terlebih dahulu tokoh-tokoh Aceh melakukan rapat rahasia di Rumah Teuku Nyak Arif, diantara yang mengikuti rapat rahasia perwakilan dari Uleebalang yaitu Teuku Nyak arif, Teuku Panglima Polem Muhammad Ali, Teuku Ahmad, sedangkan yang mewakili PUSA yaitu Daud Beureueh dan Teungku Abdul Wahab Seulimuem. Pada saat rapat rahasia tersebut lahirlah sebuah konsensus bersama, dikeluarkan sebuah pernyataan sumpah setia mereka kepada Agama Islam, Bangsa serta menyusun pemberontakan melawan Belanda dan Bekerjasama dengan pihak Jepang.²⁴

3. Modernisasi Kurikulum Pendidikan Islami

Organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) sejak dibentuk pada tahun 1939 memberikan cara pandang baru terhadap perbaikan lembaga pendidikan Islam. Tidak hanya dalam pendidikan, organisasi ini juga mewarnai perpolitikan dan keagamaan di Aceh sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia.

Ada poi-poin penting yang menjadi titik fokus peneliti tentang peran organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dalam melakukan pembaharuan kurikulum pendidikan Islam di Aceh tahun 1939-1953. Pembaharuan kurikulum yang peneliti kaji yaitu tentang mengintegrasikan mata pelajaran pada lembaga pendidikan Islam PUSA, peraturan-peraturan Guru, Murid dan calon Murid di lembaga pendidikan Islam PUSA, tantangan yang dihadapi dalam melakukan pembaharuan, dan implementasi kurikulum pendidikan Islam saat ini.

a. Integrasi Mata Pelajaran

²⁴ M.Junus Jamil, *Riwayat Barisan "F"* (Fujiwara Kikan) di Aceh (Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial Aceh, 1975), 4-5.

Pendidikan Aceh abad ke 16-18, dimana mata pelajaran yang diajarkan tidak hanya terbatas pada ilmu agama saja tetapi juga pengetahuan umum. Majunya pendidikan abad kejayaan ini membuka koneksi dengan Intelektual dunia Islam di berbagai negara sehingga Aceh menjadi kiblat ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Masa kemunduran pendidikan akibat penjajahan, diterjemahkan oleh tokoh-tokoh di Aceh sebagai masa kemunduran peradaban, artinya standar pendidikan yang berlaku tidak lagi sesuai dengan konteks zaman. Organisasi PUSA menyadari hal itu dan mencoba untuk memperbaikinya, misi pembaharuan pendidikan menjadi tujuan awal berdirinya organisasi ini.

Pentingnya Organisasi PUSA memberi perhatian lebih pada bidang pendidikan dikarenakan kekuatan perlawanan Aceh secara politik dan militer tidak lagi berimbang dengan Belanda. Perbaikan pendidikan dipandang sebagai satu-satunya cara menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengejar ketertinggalan akibat penjajahan. Terkait mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan PUSA lainnya secara garis besar juga tidak jauh berbeda dengan Madrasah Indrapuriyyah, mengingat kuatnya koordinasi dan komunikasi lintas tokoh PUSA dalam merumuskan kurikulum madrasah yang mereka pimpin.

Ada hal menarik kurikulum yang diimplementasikan PUSA, peneliti melihat bahwa cabang ilmu bahasa Arab menjadi pelajaran paling banyak di ajarkan. Ali Hasjmy juga memperjelas tentang pengajaran bahasa Arab, bagi murid tingkat Tsanawiyah seluruhnya digunakan Bahasa Arab, sedangkan tingkat Ibtidaiyyah selain bahasa Arab juga menggunakan bahasa Jawi sebagai pengantar. Penggunaan bahasa Arab dalam pembelajaran di lembaga pendidikan PUSA menjadi isyarat bahwa bahasa Arab sangat penting untuk mempelajari Islam pada rujukan-rujukan Timur. Selain itu, secara geopolitik bahasa Arab digunakan oleh basis-basis negara yang menyuarakan pembaharuan, hal ini memungkinkan membangun hubungan baik dengan tokoh-tokoh Islam moderat di wilayah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Junaidi Ahmad juga dapat ditemukan informasi tambahan. Menurut Junaidi pada Jami'atuddiyah Saadah Al-abadiyah Blang Paseh²⁵ diajarkan mata pelajaran Siyasah dan Imamah. Tidak semua lembaga pendidikan saat itu mengajarkan ilmu tersebut, misalnya lembaga pendidikan Darul Huda di Bambi itu lebih mengutamakan

²⁵ Madrasah yang dibangun oleh Teungku Daud Beureueh pada tahun 1929. Madrasah yang terletak di Gampong Blang Paseh, Kabupaten Pidie ini menerapkan kurikulum moderen. Setelah dibentuk PUSA banyak tokoh-tokohnya yang mengajar pada madrasah ini.

pendidikan Aqidah.²⁶ Tokoh-tokoh PUSA memahami pentingnya politik, mereka berkesimpulan bahwa jika masyarakat tidak sekolah (terdidik) maka tidak mungkin dapat terjun ke dunia politik. Pelajaran Siyasah dan Imamah menjadi pengetahuan dasar untuk memahami perpolitikan. Maka tidaklah heran apabila melihat pergerakan orang PUSA dalam perpolitikan, dikarenakan mereka sudah dibekali pengetahuan tentang hal tersebut. Sebagai buktinya pada masa awal kemerdekaan, jabatan-jabatan strategis hampir semuanya dipegang oleh PUSA. Hal ini menandakan bahwa pendidikan yang rumuskan PUSA memberi dampak pada kemajuan sumber daya manusia (SDM).

b. Sistem Pendidikan Islam di Aceh

Semenjak berlangsungnya penjajahan oleh Belanda, pendidikan Islam tidak mendapatkan kedudukan sebagaimana mestinya, bahkan dapat dikatakan semakin tereliminasi dengan hadirnya pendidikan Barat. Lembaga pendidikan Islam di Aceh tidak mendapatkan perhatian dari otoritas pemerintah Belanda, sebab bagi dianggap sebagai penentang utama penjajahan Belanda. Secara mayoritas kaum pribumi yang beragama Islam, secara lebih khusus adalah mereka yang pernah belajar di lembaga pendidikan Islam.

Menurut Abdul Kodir dalam bukunya *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Reformasi di Indonesia*, Sekolah Barat mempunyai fasilitas memadai, ditambah dengan metode pembelajaran yang modern. Sementara itu, sistem pada lembaga pendidikan Islam masih bersifat nonklasikal, metodenya berpusat pada wetonan, sorogan, hafalan yang disampaikan pada kitab-kitab klasik, materinya semata-mata ilmu agama.²⁷ Kemudian muncul kesadaran para ulama moderat yang tergabung dalam organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), mereka mempunyai misi besar memperbaharui sistem pendidikan Islam di Aceh. Dirasakan bahwa pentingnya mengubah sistem pendidikan secara teratur, supaya pendidikan dapat menyesuaikan dengan iklim masa itu.

Hal ini membuat para ulama semakin gencar mendirikan madrasah dengan sistem terbaru. Secara tidak langsung hadirnya madrasah menambah corak pendidikan di Aceh. Sebelumnya hanya ada dua corak lembaga pendidikan yaitu sekolah kolonial dan dayah, namun setelah pembaharuan muncul lembaga pendidikan berupa madrasah, tidak lain gabungan dua corak pendidikan sebelumnya. Ada beberapa sistem pendidikan yang diubah oleh ulama PUSA.

²⁶ Hasil wawancara dengan Junaidi Ahmad pada hari Selasa 6 Januari 2026.

²⁷ Abdul Kodir, *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Reformasi Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 174.

Pertama, Sistem Belajar Berbasis Kelas. Pada umumnya lembaga pendidikan Islam sebelum lahirnya madrasah kurang teratur secara administratif, guru-guru juga terlalu sempit memahami kurikulum belajar mengajar. Sementara itu sistem pendidikan di madrasah dinilai lebih baik, pembelajarannya lebih terorganisir, administrasi teratur, guru yang mengajar mempunyai kapasitas serta pengalaman yang memadai, sehingga pelaksanaan pendidikan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pengelola madrasah.²⁸

Madrasah yang dikoordinir PUSA menggunakan sistem kelas, hal ini mengambil contoh dari kurikulum sekolah agama di Sumatera Thawalib, Padang. Kesamaan ini sangat beralasan, setidaknya ada dua alasan mendasar yaitu pertama Sumatera Barat wilayah yang awal menerima pembaharuan. Kedua banyak orang Aceh menempuh pendidikan di Sumatera Barat. Madrasah di Aceh dapat dilihat sebagai perpaduan antara konten pendidikan agama yang diberikan oleh dayah dan metode yang digunakan di sekolah dasar negeri. Diantara konten pendidikan modern seperti penggunaan belajar berbasis kelas, buku teks lengkap, papan tulis, meja, dan kursi.

Kedua, Menyediakan Fasilitas Penunjang Belajar. Adapun Teungku M. Nur El-Ibrahimi berkesempatan mengamati madrasah pertama di Aceh bernama Madrasah Khairiah, didirikan oleh Tuanku Raja Keumala, salah satu keluarga Sultan Aceh, atas inisiatifnya pada abad ke 20 madrasah ini didirikan. Letaknya di seputaran halaman Masjid Raya Baiturrahman sekarang ini. Dalam salah satu perjalanannya ke Banda Aceh. Madrasah ini masih dekat dengan dayah, karena mata pelajaran yang diajarkan di sana semuanya adalah mata pelajaran agama. Namun, lingkaran (*halaqah*) diganti dengan menempatkan para santri di kursi dan menggunakan papan tulis.²⁹ Penggunaan fasilitas kursi dan papan tulis merupakan sesuatu hal yang baru dalam dunia pendidikan Islam di Aceh. Fasilitas ini banyak digunakan pada sekolah-sekolah Belanda, sedangkan dalam tradisi pendidikan dayah tradisional saat itu tidak ada penggunaan kursi, meja dan papan tulis. Selain itu, madrasah juga menyediakan kantor guru untuk kepentingan para pengajar dan kepala madrasah. Fasilitas penunjang madrasah lainnya yang tidak digunakan dayah tradisional yaitu lonceng. Lonceng ini difungsikan sebagai penanda mulai dan berakhirnya proses pembelajaran, selain itu juga sebagai pergantian jam mata pelajaran.

²⁸ Snouck Hurgronje, *Aceh Di Mata Kolonialis*, 31–32.

²⁹ M.Nur El Ibrahimi, *Teungku Muhammad Daud Bereueh: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh* (Jakarta: Gunung Agung, 1986), 65.

Ketiga, Penggabungan Murid Laki-laki dan Perempuan. Sejak dilakukan pembaharuan pendidikan oleh kelompok modernis, beberapa sistem lama yang dianggap tidak sesuai lagi dengan konteks zaman sekarang ini di ubah sedemikian rupa. Para murid tidak lagi dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan usia mereka.³⁰ Tokoh-tokoh PUSA menganggap perempuan bagian penting dari sebuah komunitas, disebabkan pembentukan komunitas muslim yang sehat karena anak-anak cenderung menghabiskan waktu dengan ibunya. Karena alasan ini PUSA mendorong kesetaraan pendidikan perempuan dengan laki-laki, sehingga tidak ada perbedaan keduanya.

Peneliti menganalisis bahwa terjadinya perubahan dari sebelumnya belajar memisahkan laki-laki dan perempuan menjadi penggabungan dipengaruhi oleh prinsip para pengelola pendidikan. Jika ditelaah lebih lanjut, pemisahan dan penggabungan saat belajar disebabkan oleh perbedaan prinsip. Ulama-ulama tradisional yang mengelola dayah mengacu pada prinsip ajaran sufi, sementara itu ulama pembaharu seperti ulama yang tergabung dalam organisasi PUSA mengambil kebijakan berbeda dari ulama tradisional, dikarenakan mereka memegang teguh prinsip manajemen pendidikan modern.

c. Menyusun Peraturan

Pola pembaharuan yang dilakukan organisasi PUSA berorientasi pada pola pendidikan teratur dan terukur. Pendidikan Islam selama penjajahan semakin tidak terstruktur, lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional yang berjalan sekian lama bahkan pernah membawa pada kejayaan pengetahuan seolah-olah berjalan tanpa arah yang pasti.

Menurut Abdul Gani Jamora Nasution sudut masuknya ide-ide pembaharuan kurikulum pendidikan Islam setidaknya ada tiga hal, sehingga perlu diperbaharui dan itu menjadi sangat penting dalam membawa pendidikan lebih maju. Ketiga hal tersebut yaitu: Pertama, metode yang tidak puas hanya dengan metode tradisional pesantren, tetapi diperlukan metode-metode baru yang lebih merangsang murid untuk berfikir. Kedua, materi pelajaran sudah perlu diperbaharui, tidak hanya mengandalkan ilmu agama semata-mata yang bersumber dari kitab klasik, sebab Masyarakat muslim sejak awal abad ke 20 sudah merasakan peranan ilmu pengetahuan umum bagi kehidupan individu maupun kolektif. Ketiga, manajemen pendidikan berkaitan dengan

³⁰ Abdul Goni Jamora Nasution, *Pendidikan Islam dalam Catatan Sejarah* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 57.

sistem lembaga pendidikan dengan bidang lainnya di pesantren.³¹ Terkait dengan peraturan, Ulama PUSA menetapkan peraturan kepada para guru, murid, dan calon murid baru madrasah. Berikut dibawah ini akan penulis tampilkan beberapa peraturan yang dirumuskan oleh Ulama PUSA, diantaranya:

Tabel 1. Peraturan untuk Guru Madrasah

No	Peraturan Guru Madrasah
1.	Wajib guru-guru datang ke madrasah sebelum lima menit pukul delapan, kalau takhir lima menit sesudah pukul delapan pelajaran diganti oleh orang lain dan gaji itu dipotong menurut bulannya.
2.	Diwajibkan pula atas guru menjaga kebersihan anak-anak sekurang-kurangnya seminggu sekali.
3.	Anak-anak yang takhir ke madrasah wajib atas guru menyeterapkan dengan berdiri ataupun menulis apa-apa kesalahan murid, seberapa banyak murid-murid takhir, tiada kalau dengan permisi.
4.	Wajib atas guru melarang anak-anak meludah di lantai kantor.
5.	Wajib atas guru menyuruh anak-anak meletakkan tangan di atas meja (bangku).
6.	Wajib atas guru melarang kepada anak-anak supaya jangan bersenda gurau di dalam kelas.
7.	Wajib pula guru-guru melarang anak-anak berbaju pendek lengannya ke dalam madrasah.
8.	Diwajibkan atas guru-guru supaya menjaga kebersihan di dalam kelas saban hari dan menyuruh membersihkan kepada anak-anak tiap-tiap satu kali sebanyak-banyaknya tiga orang hingga terus menerus.
9.	Wajib atas guru bertelaah dan memikirkan bagaimana memasukkan pelajaran kepada murid dengan senang dan lekas murid paham.
10.	Tiada boleh sekali-kali guru bercakap dengan orang yang bukan (tiada) bergantung dengan madrasah jikalau sebelum izin oleh kepala.
11.	Tiada boleh sekali-kali guru meninggalkan madrasah sebelum habis waktu Pelajaran masing-masing melainkan sesudah izin kepala.
12.	Wajib atas guru menyuruh berdiri anak-anak bila guru-guru masuk mengganti pelajaran.

Peraturan yang diberlakukan kepada guru madrasah menekankan lahirnya sikap disiplin, dan tanggung jawab penuh sebagai pengajar. Setidaknya dari 12 poin peraturan yang ada, 3 poin diantaranya langsung berkaitan terhadap individu guru, sedangkan 9 poin lainnya peraturan yang dibebankan madrasah kepada guru terkait mendidik dan mengelola kedisiplinan murid. Berdasarkan peraturan yang diberlakukan tersebut, ada satu poin peraturan madrasah yang sangat

³¹ Ibid., 70.

menarik yaitu guru diperkenankan oleh madrasah menyeterap atau memberi hukuman kepada murid yang terlambat datang ke madrasah. Peraturan memberi hukuman terhadap murid terlambat sekarang ini dianggap keras dan tidak lagi relevan. Namun jika ditinjau konsep-konsep pendidikan Islam, pemberian hukuman diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan khusus.

Pengelola madrasah sangat memahami arti penting disiplin, tidak terlambat datang ke madrasah bukti komitmen murid bersungguh-sungguh mengikuti proses belajar. Adanya hukuman bagi murid yang terlambat datang sebenarnya untuk mengajarkan murid pentingnya disiplin dan mengelola waktu secara baik. Peraturan-peraturan sebagaimana dijelaskan jarang ditemui pada dayah di Aceh saat itu. Madrasah berusaha mengubah manajemen pendidikannya lebih baik meskipun dari hal-hal sederhana. Secara tidak langsung madrasah ingin menanamkan nilai-nilai ajaran Islam pada murid, sehingga murid menjadi manusia berakhlak mulia dan bermanfaat bagi ummat.

Tabel 2. Peraturan Murid Madrasah

No	Peraturan Murid Madrasah
1.	Anak-anak wajib menuruti perintah guru-guru tentang kebenaran.
2.	Mesti hadir ke madrasah sebelum pukul delapan.
3.	Wajib anak-anak menghormati guru-gurunya.
4.	Wajib anak-anak hadir ke madrasah bila lonceng berbunyi.

Jumlah peraturan yang diberlakukan kepada murid lebih sedikit apabila dibandingkan peraturan guru, peraturan murid hanya berisi 4 poin saja sedangkan guru memiliki 12 poin. Hal ini seakan memberi pesan bahwa untuk mewujudkan murid berkualitas dibutuhkan tenaga pengajar yang berkualitas juga. Guru menjadi contoh (*uswatun hasanah*) bagi murid sehingga jumlah peraturan kepada guru lebih banyak dan detail. Berdasarkan peraturan murid yang diberlakukan di madrasah Indrapuriyyah, terdapat satu poin yang sangat jelas menunjukkan bahwa madrasah mengadopsi peraturan seperti di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, poin tersebut yaitu menggunakan lonceng sebagai tanda masuk kelas dan dimulai jam belajar.

Pada lembaga-lembaga Islam tradisional tidak ada peraturan seperti di madrasah. Tanda dimulai dan mengakhiri proses belajar di dayah sangat tergantung guru, biasanya tradisi di dayah

yaitu belajar dimulai apabila guru sudah siap mengajar dan diakhiri apabila materi sudah disampaikan semuanya dan tidak ada pertanyaan yang diajukan, tidak ada ketentuan waktu tetap, boleh jadi cepat dan terkadang telat terjadinya proses pembelajaran.

Tabel 3. Peraturan untuk Calon Murid Baru Madrasah

No	Peraturan Calon Murid Baru Madrasah
1.	Sekali-kali tiada diterima anak-anak yang belum keluar dari sekolah <i>Government</i> ataupun <i>Voolkschool</i> .
2.	Tiada diterima anak-anak yang lebih umurnya 15 tahun kalau untuk kelas tahizi.
3.	Wajib atas bapak yang hendak memasukkan anaknya kemari lebih dulu berjumpa dengan kepala madrasah ataupun wakilnya.
4.	Anak-anak yang bukan orang tuanya ataupun walinya memasukkan ke Madrasah tiada diterima selain anak-anak yang dikenal oleh Kepala Madrasah.

Tidak hanya peraturan terhadap guru dan murid, madrasah juga membuat seperangkat peraturan untuk calon murid baru. Hal ini bertujuan untuk transparansi, objektif dan menjamin kesempatan terhadap penerimaan murid baru. Adanya peraturan seperti ini juga sangat membantu meningkatkan mutu layanan madrasah serta dapat mengelola input murid agar pengembangannya menjadi lebih berkualitas sesuai standar yang ditentukan madrasah. Pada poin kesatu dapat dipahami bahwa pihak pengelola madrasah tidak anti terhadap sekolah Belanda, bahkan dijadikan kriteria pertama syarat penerimaan murid baru di madrasah. Setidaknya murid yang pernah belajar di sekolah pemerintah Belanda atau sekolah umum sudah dapat membaca dan menghitung sehingga guru di madrasah tidak banyak menghabiskan waktu mengajarkan mereka materi dasar.

Hal ini menunjukkan keterbukaan pemikiran kaum pembaharu, mengambil sesuatu yang dianggap membawa kemaslahatan dan manfaat. Menurut ulama-ulama pembaharu ditinjau dari sudut pandang syariat tidak menjadi sebuah kesalahan apabila mengambil contoh baik dari penjajah, selama tidak menyangkut persoalan akidah. Berbeda dengan pemikiran di lembaga Islam tradisional yang sangat anti kolonial, mereka beranggapan segala sesuatu yang datang dari penjajah semuanya buruk, sehingga tidak perlu mengambil contoh dari penjajah kafir Belanda.

KESIMPULAN

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa peran organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dalam melakukan pembaharuan kurikulum pendidikan Islam di Aceh dari tahun 1939-1953 sangat besar. Organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) berhasil melakukan integrasi mata pelajaran, mengubah sistem pendidikan di Aceh lebih moderen, dan menyusun peraturan bagi guru, murid dan calon murid baru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen PUSA memperbaiki mutu pendidikan Islam di Aceh.

REFERENSI

- Abdullah, Taufik. *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1987.
- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Andil PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) Untuk Bangsa Dan Negara*. Cetakan kedua. Banda Aceh: PeNA, 2021.
- Alfian, Ibrahim. *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Amiruddin, M. Hasbi. *Aceh Dan Serambi Makkah*. Edisi revisi, Cetakan II. Banda Aceh: PeNA, 2008.
- . *The Response of the Ulama Dayah to the Modernization of Islamic Law in Aceh*. Cet. 1. Siri Aceh Meukuta Alam. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005.
- Azra, Azyumardi, dan Idris Thaha. *Menggapai solidaritas: tensi antara demokrasi, fundamentalisme, dan humanisme* | WorldCat.org. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002. <https://search.worldcat.org/title/53308171>.
- Creswell, John W, dan J. David Creswell author. *Research Desing: Quantitative, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sexta edición. Research Methods. Thousand Oaks, California: SAGE Publications Ltd., 2023. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf.
- Dedikasi Sang Petarung Tgk. Muhammad Daud Beureueh*. Pustaka Indis, 2018.
- Dewanto, Nugroho. *Daud Beureueh: pejuang kemerdekaan yang berontak*. Jakarta, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) ; Majalah Tempo, 2011.
- El Ibrahimy, M.Nur. *Teungku Muhammad Daud Bereueh: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.

- Hasbullah. *Uleebalang, Dari Kesultanan Hingga Revolusi Sosial, 1514-1946*. Disunting oleh Rusdi Sufi. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2015.
- Hasjmy, Ali. *Dari Sini Ia Bersemi*. Banda Aceh: Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1981.
- Hasymy, A. *Ulama Aceh: Mujahid, Pejuang Kemerdekaan, Dan Pembangun Tamadun Bangsa*. Cet. 1. Jakarta: Diterbitkan oleh PT. Bulan Bintang untuk Perpustakaan dan Museum Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy, 1997.
- Ibrahim, Basri. "PENDIDIKAN ISLAM DI ACEH (1966-1998) DENGAN MENGANALISIS ASPEK PERUBAHAN (TRANSFORMASI)." *ANALYTICA ISLAMICA* 21, no. 2 (2019): 138–48.
- Jamil, M.Junus. *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Aceh*. Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial Aceh, 1975.
- Kodir, Abdul. *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Reformasi Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nasution, Abdul Goni Jamora. *Pendidikan Islam dalam Catatan Sejarah*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Nur'aini. *Peran Ulama Dalam Politik Aceh Kontemporer*. Darussalam, Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Ar-Raniry, 2013.
- Saefuddin, Didin. *Sejarah Politik Islam*. Cetakan pertama. Jakarta: Pustaka Intermasa, 2009.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. *Revolusi di serambi Mekah: perjuangan kemerdekaan dan pertarungan politik di Aceh, 1945-1949*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1999.
- Snouck Hurgronje, C. *Aceh Di Mata Kolonialis*. Cet. 1. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- Sudirman. *Mesjid-Mesjid Bersejarah Di Aceh*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011.
- Sufi, Rudi. *Gerakan Nasional di Aceh 1900-1942*. Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, t.t.
- Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Ed. 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.